

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NO. 47 TAHUN 2017 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
DAGING SAPI di KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**RASINTA HOTNAIDA NAINGGOLAN**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRACT**

### **STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF MINISTER OF TRADE REGULATION NO. 47 OF 2017 CONCERNING THE HIGHEST RETAIL PRICE OF BEEF IN THE CITY OF LAMPUNG**

**By**

**Rasinta Hotnaida Nainggolan**

*The aims of this study are to evaluate the implementation of the Ministry of Trade regulation No. 47 2017 concerning the highest retail price of 10 commodity in Indonesia and to identify the supporting and inhibiting factors of the regulation. This study specifically observed the implementation of the regulation in Bandar Lampung city and its surroundings. This study involved 2 cattle ranchers, 2 slaughterhouses, 12 traders, and 6 beef consumers in Bandar Lampung. The data was collected in March 2019. The study used qualitative analysis to answer the first purpose and Ripley and Franklin's analysis for the second purpose. The study shows that implementation of said regulation has been unsuccessful because there were no supporting factors, lack of information, lack of compliance, lack of public curiosity, and lack of publication from the Ministry of Trade.*

**Keywords: beef, implementation, regulation, trade**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 47 TAHUN 2017 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAGING SAPI di KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Rasinta Hotnaida Nainggolan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan dari Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2017 di Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa Bandar Lampung adalah daerah dengan populasi yang cukup tinggi, pusat perekonomian dan mengkonsumsi daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuhnya. Sampel adalah 2 peternak, 2 RPH, 12 pedagang, dan 6 konsumen daging sapi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui keberhasilan implementasi regulasi dan menggunakan teori Ripley dan Franklin untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2017 di Bandar Lampung tidak berhasil, dan faktor pendukung kebijakan ini adanya SOP dan Satgas pangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dari dinas perdagangan, mayoritas pedagang belum mengetahui isi HET daging sapi, dan isi peraturan tidak sesuai dengan masalah-masalah pemasaran daging sapi yang terjadi dilapangan.

**Kata kunci** : daging sapi, pelaksanaan het, peraturan, perdagangan

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NO. 47 TAHUN 2017 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
DAGING SAPI di KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**RASINTA HOTNAIDA NAINGGOLAN**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PERTANIAN**

Pada

Jurusan Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NO.47 TAHUN  
2017 TENTANG HARGA ECERAN  
TERTINGGI DAGING SAPI di KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Rasinta Hotnaida Nainggolan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1514131069

Program Studi : Agribisnis

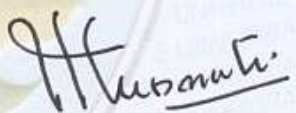
Fakultas : Pertanian

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.**  
NIP 19610921 198703 1 003



**Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.**  
NIP 19621120 198803 2 002

2. Ketua Jurusan Agribisnis



**Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.**  
NIP 19691003 199403 1 004

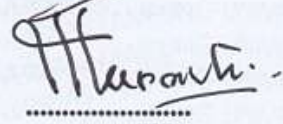
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.**



Sekretaris : **Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.**



Penguji  
Bukan Pembimbing: **Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Agustus 2019

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sibuntuon pada tanggal 05 Januari 1998, anak dari pasangan Bapak Maringan Nainggolan dan Ibu Juliana Sitio. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat sekolah dasar (SD) di SD Swasta Riama Sibuntuon pada tahun 2009, tingkat pertama (SMP) di SMP Swasta Riama Sibuntuon pada tahun 2012, dan tingkat atas, (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Pematang Siantar pada tahun 2015. Penulis diterima di Jurusan Agribisnis pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis melaksanakan *Home Stay* di Desa Rejosari Dusun Solo selama 7 hari, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sirnagalih, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2018. Pada Juli-Agustus 2018, penulis melakukan Praktik Umum (PU) di P4S Budi Rahayu Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat selama 30 hari kerja efektif.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi di internal maupun eksternal kampus. Penulis pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan pelatihan Website. Penulis pernah aktif sebagai anggota bidang II yaitu bidang pengkaderan pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 pada organisasi Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEPERTA). Penulis pernah menjadi anggota Divisi 3 yaitu bidang pelayanan dan doa pada organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen periode 2017 dan Ketua divisi 3 pada organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen pada periode 2018.



## SANWACANA

Puji Syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus, atas berkat dan karuniaNya penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan, serta saran yang membangun, dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi Daging Sapi di Kota Bandar Lampung”**. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Agribisnis, atas arahan, bantuan, semangat, dan nasihat yang telah diberikan.
3. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S., sebagai dosen pembimbing pertama yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dorongan, dan ilmu yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dorongan, dan ilmu yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis.

6. Rio Tedi Prayitno, S.P., M. Si. Sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak nasehat selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Jurusan Agribisnis atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
8. Karyawan-karyawan di Jurusan Agribisnis (Mba Vanesa, Mba Ayi, Mba Tunjung, Mba Iin, Mas Boim, Mas Buchori ), atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.
9. Keluarga tercinta Bapak tersayang Maringan Nainggolan, Mamaku tercinta Juliana Sitio, serta keempat adikku yang sangat ku kasihi Kristiadi Estomihi Nainggolan, Jan Piter Riandika Nainggolan, Agustino Aditya Nainggolan, dan Ubay Rizky Nainggolan yang selalu mendoakanku, memberikanku kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat, dukungan dan saran kepada penulis.
10. Inangku Dailim Sitio, Opungku Rama Sinta Purba, Opung Dear Bekasi, Uda, Nanguda, Tulang, Nantulang, Bapa Tua, Mama Tua, Bou, Amangboru, dan keluarga besar Nainggolan dan Sitio yang sangat ku sayangi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabatku Dewi Kristina Simamora, Swita Enjelina Simamora, dan Adikku Angela Gabriela Situmorang. Terimakasih buat kalian bertiga bisa menjadi tempatku berkeluh kesah selama menempuh pendidikanku, bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertumbuh bersama dalam iman dan saling menguatkan satu dengan yang lain aku sayang kalian.
12. Gengges Pejuang Skripsi nama geng kita, teman seperjuanganku untuk sama-sama meraih gelar sarjana. Aminah Candra Kasih, Amni Apriyani, Dwina Chairunnisa, Efti Arifa, Elisya Pratiwi, Febri Adelia Fitri, Gita Dhika Citra

Putri Andini, Indah Sabiela, Lea Ayu Utari, Puji Arita Lestari, Sulastri Rotalenta Sianturi, dan Tika Puji Rahayu. Kita geng paling banyak personilnya, ya kita berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda tapi itu tidak menjadi masalah dipertemanan kita. Buat kalian terimakasih sudah membantuku selama aku kuliah dan kalian sudah membuat masa kuliahku lebih berwarna sukses buat kita semua aku sayang kalian.

13. Adikku Lesna Debora Nainggolan teman sekamarku kurang lebih selama setahun terakhir terimakasih buat semua dukungan dan semangat yang kamu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Josua Siregar, Verayanti Siregar, Riska Nainggolan, Nita Siregar, Dedi Parhusip, dan semua keluarga besar Nainggolan Siregar yang ada di Universitas Lampung terimakasih buat kalian yang membantu dan mendukung aku selama menempuh perkuliahan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini aku mengasihi kalian.
15. Agus Kurniawan Damanik, Riris Silalahi, Binsar Hermawan Sitorus, Gresia Dameria Tindaon, dan Erwin Jeremy Alex Sihombing. Terimakasih sudah menjadi keluarga sedivisi di UKM Kristen sejak tahun 2017 sampai saat ini aku mengasihi kalian.
16. Mario Dagomes, Tondi Oloan Simbolon, Helen Julianti, Auryn Sela Setiadi, Walden Jerry, dan Mitha Valentreesya Panjaitan. Terimakasih sudah menjadi keluarga baru, sedivisi di UKM Kristen sejak tahun 2018 yang selalu memberikan semangat untukku aku mengasihi kalian.

17. Eni Manik, Adelica Panjaitan, Devi Purba, Lestari Silaban, dan Essy Dumayanti Pakpahan. Terimakasih buat kalian adik-adikku yang selalu memberikan semangat untukku sukses buat kalian dan aku mengasihi kalian.
18. Jesy Oktavia Panggabean dan Era Indah Sidauruk terimakasih buat kalian boleh ada dicerita hidupku ketika aku menempuh pendidikanku di Universitas Lampung ini. Terimakasih buat dukungan doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku aku mengasihi kalian.
19. Bang Andre Parmonangan Panjaitan, Bang Bobby K. Barasa, Bang Sahel Renegade Saragih, Ka Juliana Marbun, dan Ka Dorlan Evi Yanti Sitorus. Terimakasih buat abang dan kakak yang sudah memberiku banyak nasehat dan pengalaman dalam perkuliahan dan pelayananku aku mengasihi kalian.
20. Bang Bangkit Pandiangan, Ka Lika Sitorus, Ka Friscilya Sembiring, Anyta Situmorang, Tabita Magdalena, Nova Nababan, Monalisa Sianturi, Ka Christanty Saragih, Yoko San, Bang Rangga Sianturi, Rehta Yunani, Indah Pasaribu, Tri Agustinus, Bang Wernat simamora, Alfa Ziliwu, Hagai Aritonang, Josua Nababan, Putra Sinaga, Tiurma Mutiara, Maraduan Sitanggung, Erica Simanjuntak, Obet Yanto Saragih, Naftalia Fieniti, Ribka Marpaung, Aldi Elieser, dan Franklin Daniel. Terimakasih buat teman-teman sepelayanan menjadi pengurus UKM Kristen tahun 2017 dan tahun 2018 bersyukur boleh dibentuk diwadah pelayanan ini dan memiliki teman-teman terbaik seperti kalian aku mengasihi kalian.
21. Adik-adikku Sarah Siregar, Novita Sitio, Rexy Pakpahan, Yemima Simamora, Evelyn Pakpahan, Mery Cristanty Saragih, Clara Simanjuntak, Wenti Matanari, Erin, Agape, Ruthmana, Dodo, Herlambang, Rivaldo,

Chaterine , dan adik-adik pengurus UKM Kristen 2019. Terimakasih buat doa dan semangat yang selalu kalian berikan selama penulisan skripsi ini.

22. Bang Josua Sinaga, Bang Rikardo Sihombing, Bang Frengki Pasaribu, Ka Tania Sipayung, Ce Juli, Ka Friska, Ka Monita, Ka Rika, Friska, Bebe, Bang Gian Girsang, dan teman-teman COOL Unila dan COOL Youth Way Halim terimakasih buat kalian semua yang telah mendukung dan menjadi teman bertumbuh dalam iman aku mengasihi kalian.
23. Teman-teman sepelayanan di POMPERTA, keluarga besar HIMASEPERTA, teman-teman kelompok kecil yang ada terimakasih untuk nasehat dan doa yang kalian berikan aku mengasihi kalian.
24. Febrina Saragih dan Magdalena Manurung terimakasih sudah membantu penulis selama perkuliahan bahkan sampai menyelesaikan skripsi ini.
25. Debby Siregar, Santiria Sinaga, Sry Elda Tampubolon, Yesiria Simanungkalit, Seriana Manurung, Yolanda Nainggolan, Wahyu Nainggolan, Rika Napitupulu, dan teman-teman kelas XII IPA-5 terimakasih buat semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.
26. Erisa, Natha, Meiliani, Esty, Aris, Brigitta, Wenny, Cindy, Evita, Sulastri, dan Elisa terimakasih kalian boleh ada menemaniku dan mendukungku sampai aku boleh menyelesaikan perkuliahanku di Universitas Lampung ini.
27. Agribisnis angkatan 2015 yang tidak bisa kusebut satu persatu terimakasih buat semua cerita yang kita pernah ukir bersama di Juusan Agribisnis Fakultas Pertanian ini sukses untuk kita semua. Terkhusus kelas B yang kusayangi terimakasih buat semua suka duka yang boleh kita lalui bersama-sama sewaktu duduk dibangku perkuliahan, Evita Natasya Hutapea, Santa M.

- Situmorang, Elisa Sijabat, Husnaini Finalisa, Erin, Revani Intan Putri, Mutiara, Riska, Nevy, Sony, Novita, Nurul, Yesi, Dwi Maulita, Susanto, Wangga, Yusuf, Nico, Kukuh, Rizky Destiana, Riswanto, Priya, Arsendi, Firas, Galuh, dan Filipus dan teman genggesku. Sukses untuk kita semua.
28. Anak kosan bapak Makmun tersayang Anania Sitohang, Shelina, mbak Nana, Zakia, Mega, dan Yulia terimakasih buat kalian yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai pada masa skripsi.
29. Dina, Ani, Evi, Roy, Andi, dan Fariz teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Sirnagalih terimakasih buat kalian yang memberiku banyak pelajaran selama kita melakukan Kuliah Kerja Nyata sukses buat kita semua.
30. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan setiap orang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2019

Penulis,

*Rasinta Hotnaida Nainggolan*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
A. Kebijakan.....	12
B. Teori Harga.....	13
C. Kebijakan Harga.....	15
D. Pasar.....	19
E. Agribisnis Sapi.....	19
F. Pembentukan satuan tugas pangan.....	22
G. Teori Implementasi.....	22
H. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan.....	30
I. Saluran Pemasaran.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Metodologi Dasar Penelitian.....	36
3.2. Konsep Dasar dan Batasan Operasional.....	37
3.3. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian.....	38
3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	40

<b>IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Letak Geografis, Administratif dan Penduduk Kota Bandar Lampung. ....	42
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
5.1. Karakteristik Umum Responden .....	48
5.2. Harga Sapi dan Daging Sapi .....	52
5.3. <i>Stakeholder</i> .....	58
5.4. Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tentang Harga Ecerera Tertinggi Daging Sapi di Kota Bandar Lampung.....	61
5.5. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	63
5.6. Rantai Pasok Daging Sapi.....	67
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi Tahun 2013-2017 di Indonesia. ....	3
2. Produksi daging ternak di kota Bandar Lampung pada Tahun 2017.....	4
3. Konsumsi produk peternakan per kapita per minggu di Indonesia pada tahun 2013-2016 .....	5
4. Konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Bandar Lampung tahun 2016 .....	7
5. Rata-rata harga daging sapi di Kota Bandar Lampung tahun 2015 hingga tahun 2017.....	8
6. Data Inflasi Bandar Lampung pada Bulan Mei 2017 hingga Mei 2018.....	9
7. Harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.....	10
8. Konsep dasar dan batasan operasional.....	37
9. Harga daging sapi kualitas 1 dan 2 ditingkat RPH.....	46
10. Harga daging sapi kualitas 1 dan 2 ditingkat pedagang.....	47
11. Harga daging sapi ditingkat peternak.....	101
12. Harga daging sapi berdasarkan jenis ditingkat RPH.....	55
13. Harga daging sapi ditingkat pedagang.....	103
14. Jumlah pembelian konsumen terhadap daging sapi.....	57
15. Harga daging sapi berdasarkan jenis di pasar tradisional.....	62
16. Penelitian Terdahulu .....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kurva Permintaan Dan Penawaran .....	14
2. Pengaruh Penetapan Harga Dasar .....	17
3. Pengaruh Penetapan Harga Maksimum .....	18
4. Kerangka Pemikiran Kajian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi Daging Sapi Di Kota Bandar Lampung.....	35
5. Jumlah Penduduk di Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Hingga Tahun 2016 .....	43
6. Sebaran Umur Responden.....	48
7. Sebaran Jenis Kelamin Responden.....	49
8. Sebaran Lama Usaha Responden.....	51
9. Pola aliran rantai pasok daging sapi.....	72

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dimana, ketersediaannya harus terjamin dan terpenuhi sebagai syarat utama guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan kualitas SDM, erat kaitannya dengan perbaikan gizi masyarakat, kesehatan dan tingkat pendidikan. Salah satu sumber gizi dan protein yang tinggi adalah pangan sumber protein hewani.

Pangan hewani lebih berkualitas karena mudah digunakan oleh tubuh dan mempunyai komposisi asam amino yang lengkap ( Panuhun, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Kebijakan pembangunan bidang pertanian khususnya dalam penyelenggaraan pangan nasional telah dipaparkan dalam Undang-Undang No 18 tahun 2012. Secara umum undang-undang ini sudah mengatur pembagian peran masing-

masing tingkat pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan nasional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan pembagian wewenang dalam mengeksekusi pengaturan kebijakan pembangunan pertanian. Wicaksono (2012), berpendapat bahwasanya pangan merupakan isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perkara ketahanan pangan seharusnya dijadikan prioritas. Salah satu yang menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia saat ini adalah terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya.

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan (Manurung, 2008).

Permintaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat dikatakan cukup besar, khusus untuk memenuhi kebutuhan pangan yang harus dikonsumsi konsumen setiap harinya. Namun dapat dilihat bahwa saat ini sangat mahalnya harga bahan makanan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Salah satu jenis pangan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat yaitu daging untuk memenuhi protein dalam tubuh manusia.

Daging merupakan bahan makanan hewani yang digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, karena rasanya lezat dan mengandung nilai gizi yang tinggi.

Daging merupakan sumber protein yang tinggi, protein ini disebut sebagai asam amino esensial, asam amino ini sangat penting dan merupakan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu daging juga mengandung karbohidrat, lemak, mineral, fosfor, vitamin, dan kalsium (Wijayanti, 2014). Salah satu jenis daging yaitu daging sapi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi daging sapi data produksi daging sapi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi daging sapi menurut provinsi tahun 2013-2017 di Indonesia.

Provinsi	Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi (Ton)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	8.747,00	8.814,00	10.047,57	10.400,81	8.550,00
Sumatera Utara	18.437,00	22.656,00	23.047,97	25.571,07	26.298,00
Sumatera Barat	23.099,00	24.943,00	26.007,15	26.440,92	20.206,00
Riau	8.243,00	9.298,00	8.676,70	9.396,29	7.700,00
Jambi	4.386,00	4.329,00	4.654,22	4.386,38	4.085,00
Sumatera Selatan	14.496,00	15.281,00	16.689,35	17.878,73	12.666,00
Bengkulu	4.222,00	3.106,00	3.364,73	3.056,96	2.587,00
<b>Lampung</b>	<b>14.099,00</b>	<b>13.074,00</b>	<b>12.336,73</b>	<b>12.609,07</b>	<b>13.000,00</b>
Kep. Bangka Belitung	2.966,00	3.427,00	2.538,73	2.316,67	2.601,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Tabel 1 diketahui bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan produksi daging sapi yang mengalami penurunan yang berfluktuatif dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2017 produksi daging sapi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Akibat produksi yang berfluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2013, sedangkan permintaan tetap maka harga daging akan cenderung meningkat. Tahun 2018 impor daging di Indonesia sebesar 160.197 ton. Impor daging sapi ini dilakukan untuk

menstabilkan harga daging sapi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengimpor daging sapi.

Salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat produksi daging sapi terendah yaitu Kota Bandar Lampung. Produksi daging sapi di Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi daging ternak di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017.

Wilayah	Jumlah Populasi Ternak Sapi (Kg)		
	2014	2015	2016
Lampung Barat	5.087	5.810	6.261
Tanggamus	4.516	6.510	6.265
Lampung Selatan	110.204	111.195	1.131.352
Lampung Timur	114.366	118.188	125.676
Lampung Tengah	205.986	260.054	260.569
Lampung Utara	25.764	28.017	28.437
Way Kanan	33.200	33.452	33.707
Tulang Bawang	18.959	18.902	19.084
Pesawaran	15.354	16.489	16.886
Pringsewu	10.691	10.807	10.906
Mesuji	10.650	8.886	8.537
Tulang Bawang Barat	15.878	17.393	17.917
Pesisir Barat	9.110	10.777	9.588
<b>Bandar Lampung</b>	<b>2.103</b>	<b>1.785</b>	<b>1.504</b>
Metro	5.949	6.098	7.223
Provinsi Lampung	587.827	653.998	665.712

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Tabel 2 Kota Bandar Lampung memiliki populasi ternak sapi yang paling rendah diantara kabupaten lainnya, dimana populasi ternak sapi ini berfluktuatif dari tahun ke tahunnya. Data populasi ini juga menunjukkan bahwa rendahnya produksi daging sapi di Kota Bandar Lampung sehingga sebagian besar pedagang membeli sapi dari luar Kota Bandar Lampung. Menurut hasil penelitian kabupaten yang menjadi tempat pembelian daging sapi adalah Kabupaten

Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah supaya kegiatan produksi di Kota Bandar Lampung tercukupi.

Kegiatan produksi tidak terlepas dari jumlah konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap suatu produk. Konsumen mengalokasikan sebagian dananya untuk konsumsi bahan makanan. Salah satunya adalah konsumsi daging sapi.

Tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, namun meskipun demikian tingkat konsumsi daging sapi dari tahun ke tahun relatif fluktuatif. Data konsumsi produk peternakan per kapita per minggu di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Konsumsi produk peternakan per kapita per minggu di Indonesia padatahun 2013-2016.

<b>Komoditas</b>	<b>Satuan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Daging sapi</b>	<b>Kg</b>	<b>0,007</b>	<b>0,005</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>
Daging ayam ras	Kg	0,067	0,070	0,076	0,092	0,098
Daging ayam kampung	Kg	0,010	0,009	0,010	0,012	0,012
Telur ayam ras	Kg	0,125	0,118	0,121	0,1868	0,1914
Telur ayam kampung	Kg	0,053	0,050	0,050	0,072	0,068

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Tabel 3 menjelaskan bahwa konsumsi daging sapi mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berfluktuatif dan pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 konsumsi daging sapi stabil yaitu sebesar 8 gram per kapita per minggu. Konsumsi daging sapitersebut rendah dibandingkan negara lain . Salah satu negara yang tingkat konsumsinya tinggi yaitu Australia dengan konsumsi 90,2 kilogram per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga.

Fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Secara tradisional fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai (Yohanes, 2007). Kota Bandar Lampung termasuk salah satu ibukota provinsi yang ada di Indonesia yang rendah dalam mengkonsumsi daging. Hal ini ditunjukkan dari data dan hasil penelitian dimana para pedagang daging sapi mengatakan bahwa permintaan konsumen akan daging sapi tidak selalu tinggi dan sebagian besar yang sering membeli daging sapi ialah pedagang bakso atau rumah makan dan orang yang pendapatannya sudah termasuk kategori cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Masyarakat di Kota Bandar Lampung ini juga mengkonsumsi daging pada waktu tertentu saja.

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung termasuk wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Masyarakat yang berdomisili di ibukota ini cenderung memiliki pola hidup yang sudah modern karena selain mengkonsumsi beras yang menjadi bahan pokok makanannya, juga mengkonsumsi daging sebagai salah satu bahan makanan yang diminati dan dikonsumsi masyarakat yang tinggal di Kota Bandar Lampung ini. Data konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsumsi daging memiliki urutan ke 6 dibandingkan jenis bahan makanan lainnya. Daging relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan makanan hewani jenis ikan, telur, dan susu.

Konsumsi daging lebih rendah diakibatkan harga daging yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga ikan, susu dan telur, disamping itu saluran pemasaran daging



yang terlalu panjang dan tidak teratur juga menjadi salah satu penyebab harga daging meningkat.

Tabel 4. Konsumsi bahan makanan rata-rata per kapita per tahun di Bandar Lampung tahun 2016

No	Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran (Rp/kg)	Persentase rata-rata pengeluaran
1	Gabah-gabahan	55.551	10,25
2	Umbi-umbian	3.402	0,63
3	Ikan/udang/cumi/kerang	40.836	7,54
4	Daging	22.943	4,23
5	Telur dan susu	41.859	7,72
6	Sayur-sayuran	42.141	7,78
7	Kacang-kacangan	14.213	2,62
8	Buah-buahan	26.993	4,98
9	Minyak dan kelapa	12.761	2,35
10	Bahan Minuman	14.153	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2016)

Rata-rata harga daging sapi mulai dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018 berdasarkan PIHPS Nasional tahun 2019 di Kota Bandar Lampung berkisar Rp.120.150/Kg-Rp.120.450/Kg seperti disajikan pada Tabel 5.

Harga daging sapi di Kota Bandar Lampung ini sejalan dengan hasil penelitian di beberapa pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dimana rata-rata harga daging sapi saat ini mencapai Rp.120.000/Kg.

Tabel 5. Rata-rata harga daging sapi di Kota Bandar Lampung tahun 2015-2018.

No	Tahun	Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional (Rp/kg)
1	2016	120.150
2	2017	120.150
3	2018	120.450

Sumber : PIHPS Nasional (2019)

Tingginya harga daging sapi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode waktu yang lama dan berkelanjutan. Demikian juga inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Data inflasi di Kota Bandar Lampung pada Bulan Mei 2017 hingga Bulan Mei 2018 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa selama setahun bahan makanan hanya mengalami deflasi sebanyak lima kali sedangkan mengalami inflasi sebanyak tujuh kali, bahan makanan juga merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Daging sapi merupakan salah satu bahan makan yang memiliki kontribusi yang cukup besar dikarenakan harga daging sapi yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 6. Data inflasi Bandar Lampung pada Bulan Mei 2017 hingga Mei 2018

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (dalam persen)												
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Umum	0,8	0.54	0.09	0.42	0.25	0.11	0.21	0.47	1.42	0.06	0.11	-0.01	0.05
2	Bahan Makanan	0,6	0.11	-0.17	-0.30	-0.19	0.10	0.19	0.34	0.64	0.03	0.21	-0.73	-0.22
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,03	0.01	0.09	0.03	0.01	-0.03	0.02	0.05	0.25	0.00	0.02	-0.01	0.06
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,22	0.29	0.08	0.00	0.02	0.05	0.01	0.05	0.37	0.01	0.02	0.49	-0.10
5	Sandang	0.00	0.02	0.00		0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.11	0.15	0.10
6	Kesehatan	-0.02	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.36	0.33	0.18
7	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.08	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01
8	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.01	0.11	-0.19	-0.16	0.01	0.01	-0.02	0.05	0.03	0.01	0.22	0.13	0.01

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Harga daging yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Untuk melindungi pihak konsumen maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging dengan menetapkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/ 2017 dan untuk menstabilkan harga yaitu menetapkan HET. Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017. Data harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.

No.	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani	Harga Acuan Penjualan di Konsumen
1.	a. Daging Beku	-	Rp. 80.000/Kg
	b. Daging Sapi	-	
	1). Paha Depan	-	Rp. 98.000/Kg
	2). Paha Belakang	-	Rp. 105.000/Kg
	3). Sandung Lampur	-	Rp. 80.000/Kg
	4). Tetelan	-	Rp. 50.000/Kg
2.	Daging Ayam Ras	Rp. 18.000/Kg	Rp. 32.000/Kg

Sumber : Permendag Nomor 47 Tahun 2017

Pada kenyataannya peraturan ini belum sepenuhnya direalisasikan oleh para pedagang. Hal ini dibuktikan dari harga daging sapi yang beredar dipasar lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan ini. Sebagai contoh, daging sapi kualitas I seharusnya seharga Rp 105.000/kg namun dijual dengan harga Rp 120.000/kg.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No.47 tahun 2017 oleh pedagang daging sapi di Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhambatnya implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.47 tahun 2017 di Bandar Lampung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.47 Tahun 2017 di Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.47 Tahun 2017 di Bandar Lampung.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, bermanfaat sebagai bahan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat khususnya tentang peraturan menteri perdagangan mengenai harga eceran tertinggi.
2. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan

*Policy* (kebijakan) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polis* (negara/kota), dan *polis* (kota) dalam bahasa Sanskerta dan menjadi *politia* (negara) dalam bahasa Latin. Bahasa Inggris pertengahan mengadopsi kata dari bahasa Latin tersebut menjadi *policie* untuk menunjukkan pada masalah yang berhubungan dengan publik dan administrasi pemerintah (Purwasito, 2001).

Menurut Winarno dalam Amrullah (2008), kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu, sedangkan menurut Djogo dkk (2003) kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan menggunakan instrument tertentu.

Pembuatan atau pengembangan kebijakan biasanya sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Pemerintah yang bersifat diktator, represif atau otoriter cenderung membuat kebijakan secara sepihak, artinya dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa mempedulikan masukan dari publik serta lebih memperhatikan kepentingan politik kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Namun di berbagai negara pengembangan kebijakan semakin memperhatikan pendapat atau masukan dari publik. Tekanan publik dan masyarakat madani (civil society) di Indonesia akhir-akhir ini telah memaksa sebagian elemen pemerintah untuk melakukan perubahan dan mengadopsi paradigma baru.

Pemerintah bisa melaksanakan kebijakan tetapi proses perancangan dan pembuatan kebijakan harus melibatkan publik. Publik dalam hal ini mencakup berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat umum, masyarakat adat, lembaga bukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, peruguran tinggi atau kaum akademik, tokoh agama dan pemuka masyarakat lainnya. Idealnya semua pihak ini dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sebelum akhirnya disahkan secara formal oleh pemerintah (Djogo dkk, 2003).

## **B. Teori Harga**

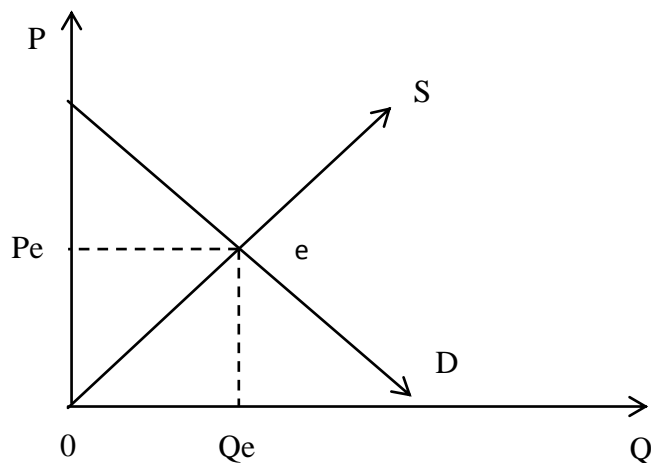
Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

### a) Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yaitu: harga barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan, selera, jumlah penduduk, perkiraan harga dimasa mendatang, pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan (Manurung, 2004).

### b) Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, harga faktor produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah (Manurung, 2004). Dapat dilihat kurva permintaan dan penawaran pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva Permintaan dan Penawaran

Sumber : Manurung (2004)



### **C. Kebijakan Harga**

Harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor konsumsi dan sektor industri sebagai sektor produksi). Sebagai cerminan-cerminan kekuatan pasar, pemerintah tidak dapat selalu dapat mengendalikan mekanisme pembentukan harga kepada kekuatan pasar atas suatu komoditi tertentu. Dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme pembentukan harga memang merupakan jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah perekonomian, tetapi seperti diketahui bahwa struktur pasar yang benar-benar sempurna pada kenyataannya belum terwujud. Oleh karena itu, agar tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata campur tangan pemerintah dalam penentuan harga sangat diperlukan (Hanafie, 2010).

Salah satu tujuan kebijakan harga pertanian adalah menstabilkan harga pertanian agar mengurangi ketidakpastian usahatani, serta menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas harga di tingkat makro. Selanjutnya dikatakan, kebijakan harga pertanian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan nilai tukar, pajak dan subsidi, serta intervensi langsung. Secara tidak langsung stabilisasi harga dapat juga dilakukan melalui kebijakan pemasaran output dan kebijakan input. Kebijakan input antara lain berupa subsidi harga sarana produksi yang diberlakukan pemerintah terhadap pupuk, benih, pestisida dan kredit (Ellis, 2018:16).

Berdasarkan penyebabnya, kebijakan stabilisasi harga atau stabilisasi harga dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan harga pangan, yaitu kebijakan harga dasar

(*floor price*) dan kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Kebijakan ini menyebabkan ketidakseimbangan pasar sehingga diperlukan kebijakan pendukung, yaitu melakukan stok atau ekspor saat kebijakan harga dasar ditetapkan dan melakukan operasi pasar saat kebijakan harga atap ditetapkan (Durianto dkk, 2002).

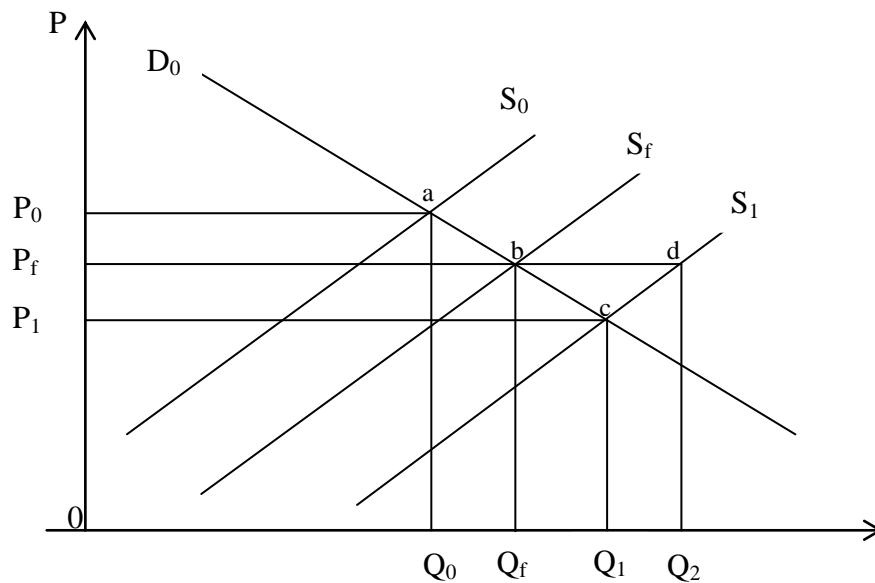
### **Harga Maksimum (*Ceiling price*)**

Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi ( HET ) atau *ceiling price*. Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Durianto dkk,2002).

### **Harga Dasar (*Floor price*)**

Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau Harga Eceran Terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut Harga Dasar (*Floor price*)(Durianto dkk, 2002).

Grafik penetapan harga dasar dapat dilihat pada gambar 2.



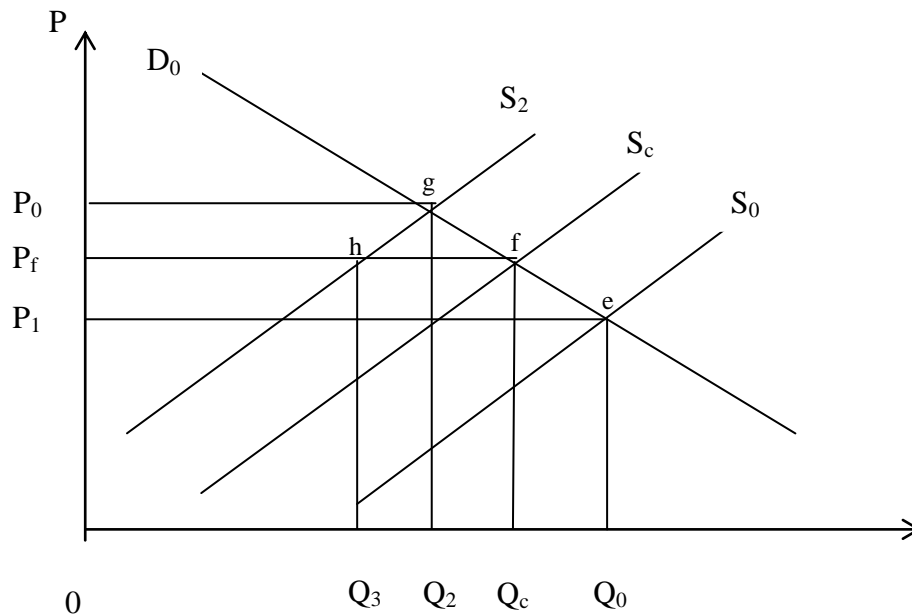
Gambar 2. Pengaruh Penetapan Harga Dasar( *Floor Price*)

Sumber : Hanafie (2010)

Pada keadaan normal jumlah barang yang ingin dibeli mengikuti kurva penawaran  $S_0$  dan keseimbangan tercapai di titik a, dalam hal ini jumlah keseimbangan yang tercapai sebesar  $Q_0$  dan harga keseimbangan  $P_0$ . Apabila jumlah penawaran suatu barang bertambah maka penawaran akan bergeser dari  $S_0$  ke  $S_1$  dan keseimbangan baru tercapai di titik c. Pada titik keseimbangan c ini jumlah keseimbangan sebesar  $Q_1$  dan harga keseimbangan  $P_1$ .

Apabila  $P_1$  ini dianggap merugikan produsen maka pemerintah dapat menentukan harga dasar sebesar  $P_f$ . Dengan ditetapkannya harga dasar sebesar  $P_f$ , jumlah yang ditawarkan sebesar  $Q_2$  dan jumlah yang diminta sebesar  $Q_1$  sehingga terjadi kelebihan penawaran sebesar  $Q_2 - Q_f$ . Agar di pasar mencapai sebesar  $P_f$  maka pemerintah harus membeli kelebihan penawaran ini. Berbeda dengan penetapan harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen namun penetapan harga

maksimum ini dibuat untuk melindungi pihak konsumen. Disajikan grafik penetapan harga maksimum pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengaruh Penetapan Harga Maksimum( *Ceiling Price*)

Sumber : Hanafie (2010)

Keadaan mula-mula, jumlah barang yang ditawarkan mengikuti kurva  $S_0$  dan jumlah barang yang diminta mengikuti kurva  $D_0$ . Pada situasi ini titik keseimbangan tercapai di  $e$ . Apabila terjadi penurunan jumlah yang ditawarkan maka keseimbangan pasar berada di titik  $g$ , dalam hal ini jumlah keseimbangan pasar  $Q_2$  dan harga keseimbangan pasar terjadi di  $P_2$ . Apabila harga  $P_2$  dianggap merugikan konsumen maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum sebesar  $P_c$  dan harga maksimum ini akan efektif (berpengaruh) apabila ditetapkan di bawah harga keseimbangan baru ( Hanafie, 2010).

#### **D. Pasar**

Pasar merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik, yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhinya persyaratan pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya beli (Assauri, 2002).

#### **E. Agribisnis Sapi**

Agribisnis sapi di Indonesia mempunyai prospek yang sangat besar, karena permintaan produk daging, susu, maupun kulit terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian nasional. Namun sangat disayangkan karena dalam beberapa dasawarsa terakhir ini impor ketiga produk tersebut cenderung terus meningkat, walaupun terjadi fluktuasi sebagai akibat adanya perubahan global maupun dinamika nasional.

Daya saing industri peternakan ditentukan pada ketersediaan pakan, disamping faktor bibit, manajemen dan kesehatan hewan, serta inovasi teknologi dan faktor-faktor eksternal lainnya. Indonesia tidak memiliki padang penggembalaan yang memadai, dan juga sangat terbatas dalam kemampuannya menyediakan biji-bijian (jagung, kedelai, kacang-kacangan, dll.), tetapi negara ini mempunyai sumberdaya pakan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu biomassa yang dihasilkan dalam usahatani, perkebunan, agroindustri, dan rerumputan yang tumbuh sebagai *cover crop*.

Inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian telah membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan untuk mencukupi

kebutuhan pakan ternak ruminansia. Bahkan biaya pakan yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sangat kompetitif. Pengembangan ternak ruminansia dengan demikian harus dilakukan dengan pola integrasi secara *in-situ* maupun *ex-situ*, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Untuk tujuan menghasilkan sapi bakalan, *crop livestock system* melalui pendekatan *low external input* merupakan pola yang harus ditempuh. Sedangkan untuk tujuan penggemukan dan ternak perah dapat menggunakan teknologi yang padat modal.

Sampai saat ini sebagian masyarakat Indonesia dapat menerima daging kerbau sebagai layaknya daging sapi. Oleh karenanya untuk kondisi agroekologi dan sosial budaya tertentu, pengembangan kerbau dapat juga dilakukan. Sementara itu pengembangan sapi potong, sapi tipe dwiguna atau sapi perah sangat tergantung pada kondisi daerah, dengan pertimbangan pada aspek kemudahan dalam mengelola dan memasarkan susu. Sedangkan secara teknis perbedaannya relatif tidak besar, kecuali dalam hal kesehatan/kebersihan dan intensitas manajemen.

Profil usaha penggemukan sapi skala 1000 ekor sapi bakalan setiap siklus dengan tiga siklus per tahun, akan diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 1,83 miliar dengan R/C ratio 1,18. Profil usaha *cow-calf operation* (pembibitan) sapi skala 1500 ekor induk untuk menghasilkan 1000 ekor sapi bakalan per tahun, akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 0,42 miliar dengan R/C ratio 1,21. Sedangkan profil usaha pabrik pakan skala 10 ton per hari, akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 0,5 miliar per tahun dengan R/C ratio 1,31.

Untuk merespon perkembangan agribisnis sapi di Indonesia dalam 10 tahun ke depan agar 90 persen kebutuhan daging dapat dipenuhi dari produk domestik diperlukan dukungan investasi sebesar Rp. 24 triliun, yang berasal dari: (i) pemerintah sekitar 10 persen berupa pembangunan sarana-prasarana, litbang, perbibitan, penyuluhan, pengamanan dari ancaman penyakit berbahaya, kelembagaan, promosi, dan dukungan akses atas sumber permodalan; (ii) investasi dari peternak kecil sekitar 60-70 persen melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, dan penambahan ternak; (iii) sedangkan investasi dari swasta sekitar 20-30 persen untuk kegiatan hulu dan hilir, serta pada usaha penyediaan bibit, budidaya sapi perah dan penggemukan.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong agar usaha ini dapat berkembang pesat antara lain adalah: (i) dukungan untuk menghindari dari ancaman produk luar yang tidak ASUH, ilegal, dan barang-barang dumping, melalui kebijakan tarif maupun non-tarif; (ii) dukungan dalam hal kepastian berusaha, keamanan, terhindar dari pungutan liar dan pajak yang berlebihan; (iii) dukungan dalam hal pembangunan sarana pendukung, kelembagaan, permodalan, pemasaran, persaingan usaha yang adil, promosi, dan penyediaan informasi, serta (iv) dukungan agar usaha peternakan dapat berkembang secara integratif dari hulu-hilir, melalui pola kemitraan, inti-plasma, dan memposisikan yang besar maupun kecil dapat tumbuh dan berkembang secara adil.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk kegiatan budidaya bagi 200.000 tenaga kerja, serta satu juta tenaga kerja dalam kegiatan hulu dan hilir. Dengan demikian

pengembangan agribisnis sapi di Indonesia akan mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa dalam hal ketahanan pangan, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, devisa, serta perekonomian nasional. (Kementan, 2018)

#### **F. Pembentukan Satuan Tugas Pangan**

Satuan Tugas (Satuan tugas) Pangan dibentuk pada Mei 2017, yang memiliki visi untuk menstabilkan harga pangan. Satuan tugas Pangan dipimpin oleh Kadiv humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang akan dibantu dengan sejumlah pejabat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sementara Satuan tugas Pangan di tingkat Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.

Satuan tugas pangan akan melakukan pengawasan harga pangan dipasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), satuan tugas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan yang melakukan kecurangan.

#### **G. Teori Implementasi**

##### **(1) Teori Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin**

Teori Ripley dan Franklin ini bersifat *top down*. Teori Rasional (*top down*) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Model implementasi inilah yang paling pertama muncul.



Menurut Ripley dan Franklin dalam Alfatih (2010) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan.

Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang daging sapiumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa

yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

## 2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Rutinitas daging sapi dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

## 3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil ketika program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang dapat menghambat lancarnya implementasi sebuah kebijakan.

## **(2) Teori George C. Edward**

Subarsono (2008), Edward III mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menekankan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi

tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

### (3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2006) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur.
- b. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan.

**(4) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli**

Cheema dan Rondinelli dalam (Subarsono, 2006) berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

**(5) Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining**

Welmer dan Vining dalam (Subarsono, 2006) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

- a. Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- c. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

## H. Teori yang digunakan dalam penelitian

Dari beberapa teori yang diutarakan di atas, dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai konsep operasional adalah yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin (Alfatih, 2010 : 51-54), adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, diantara model tidak ada yang terbaik. Menurut Riant Nugroho D (Alfatih, 2010:52) tidak ada suatu model kebijakan pun yang cocok untuk semua implementasi kebijakan sebab setiap kebijakan memerlukan model yang sesuai dengan sifat kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, model implementasi kebijakan yang mana pun bisa saja dipakai sejauh sesuai dengan kondisi yang ada dalam penelitian.
2. Model dalam Ripley dan Franklin ini lebih cocok dengan konteks penelitian ini sebab pemerintah sebagai implementor kebijakan pengamanan aset daerah berupa tanah harus patuh terhadap ketetapan keikutsertaan pada kebijakan tersebut. Disamping itu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan aset daerah pada khususnya pengamanan aset daerah berupa tanah harus punya *coreaktivitas* yang harus tetap dilaksanakan walaupun banyak kegiatan lain namun proses pengamanan aset harus tetap jalan.
3. Teori dalam Ripley dan Franklin juga mengakomodasi beberapa *point* yang terdapat pada teori Van Meter dan Van Horn serta Brian W. Hogwood and Lewis A.Gunn. Dalam teori pada buku mereka, Ripley dan Franklin menetapkan sasaran dan target kebijakan yang harus dipatuhi. Begitupun teori Van Meter dan Van Horn. Kinerja juga mendapat

perhatian, baik dalam Ripley and Franklin maupun Van Meter dan Van Horn serta Goerge C. Edward III. Begitupun dengan faktor sumber daya, kondisi ekonomi sosial, dan politik serta sikap para implementor juga sama-sama dianggap penting dalam teori mereka selanjutnya, teori dalam Ripley and Franklin juga mempunyai keterkaitan dengan teori Hogwood dan Gunn. Variabel sumber daya, tugas yang rinci dan komunikasi pada teori Hogwood dan Gunn merujuk pada faktor kelancaran rutinitas fungsi tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan point komunikasi yang baik serta prosedur yang efektif dari teori Hogwood dan Gunn secara implisit, dapat mengacuh pada dimensi kepatuhan yang terdapat pada teori Ripley and Franklin. Dengan demikian, antara ketiga teori tersebut ada keterkaitan unsur, walaupun cara pengungkapannya berbeda.

### **I. Langkah-langkah implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan proses kedua didalam perumusan kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan, dan di dalam pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Penerimaan kebijakan. Pemahaman publik bahwa kebijakan adalah “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan.
- b. Adopsi kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi



kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan.

- c. Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan keeluasaan kebijakan (Saragih, 2018).

## **J. Saluran Pemasaran**

Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan sebagian kegiatan pemasaran, sementara itu pedagang menyalurkan komoditas dalam waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan konsumen. Hal ini berarti bahwa saluran pemasaran yang berbeda akan memberikan keuntungan kepada masing-masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut. Saluran pemasaran suatu komoditas perlu diketahui untuk menentukan jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh, selain itu juga dapat mempermudah dalam mencari besarnya margin yang diterima tiap lembaga yang terlibat. Saluran pemasaran terdiri dari serangkaian lembaga pemasaran atau perantara yang akan memperlancar kegiatan pemasaran dari tingkat produsen sampai tingkat konsumen. Tiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir merupakan satu tingkat saluran (Kotler, 2002).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, ditemukan penelitian dengan judul yang hampir sama dan terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Saragih (2018) menggunakan Teori Repley dan Franklin untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah No. 57 Tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi beras di Kota Bandar Lampung. Objek yang akan diteliti yaitu pedagang dan konsumen di beberapa pasar yang ada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.

Nurdin (2013) menggunakan Teori George C. Edward III untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Teori yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Sosial Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwatiningsih (2015) adalah untuk mengetahui standar peralatan polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian analisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan agroforestri di Kawasan Hutan Bromo Karanganyar tahun 2008 oleh Amrullah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini tidak menggunakan teori implementasi.

Suryadi (2016) melakukan penelitian tentang Implementasi program daging sapi miskin (raskin) tahun 2015 di kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Edward III untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan raskin tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal metode analisis namun berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

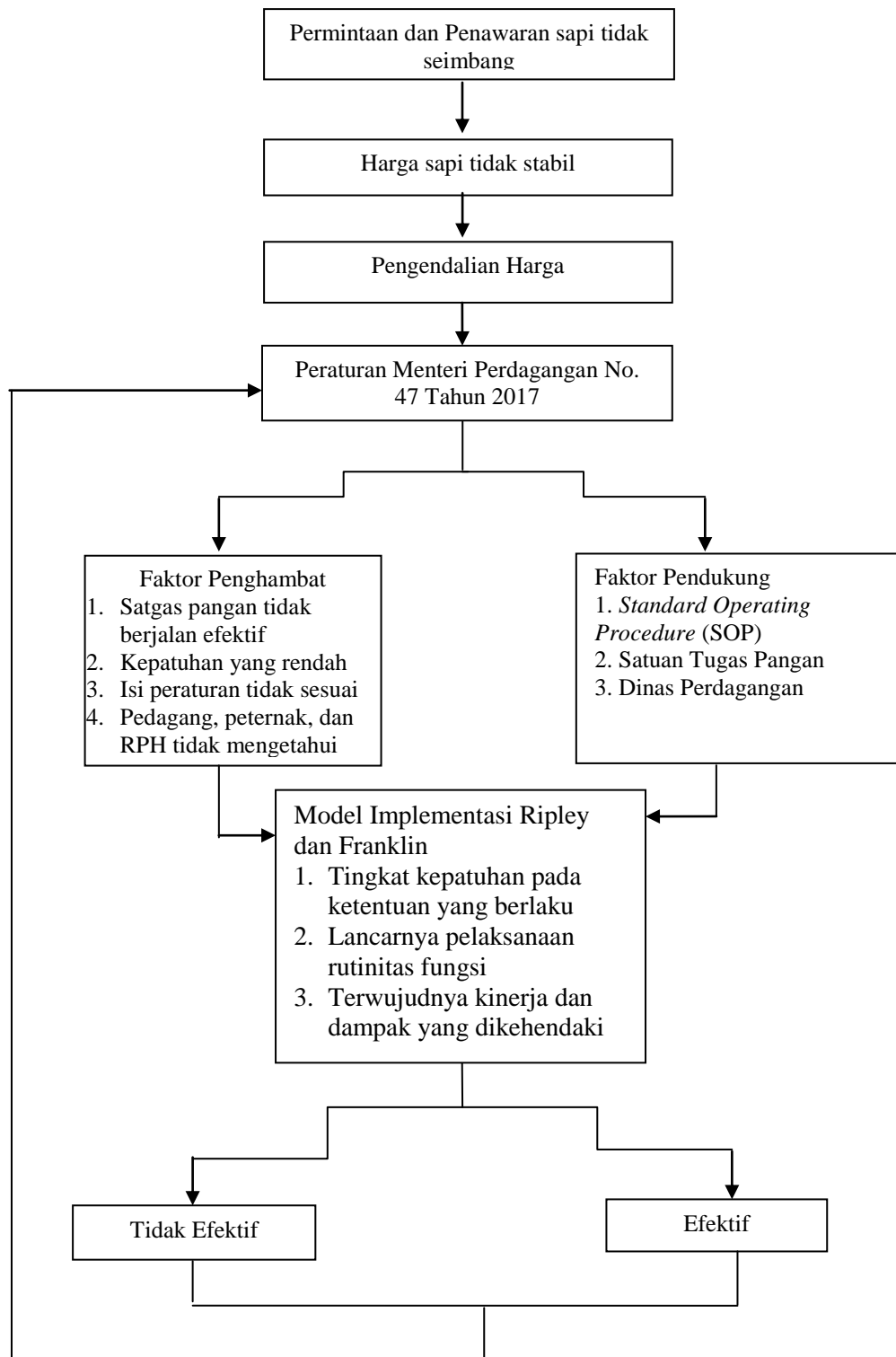
### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan penting yang permintaannya belum dapat dipenuhi sendiri oleh Indonesia sehingga impor daging sapi masih tetap ada. Selain jadi salah satu sumber protein bagi tubuh manusia, daging sapi dapat diubah menjadi bakso, sosis, dan masih banyak lagi kegunaan daging sapi ketika diolah menjadi berbagai jenis makanan lainnya hal ini menyebabkan permintaan daging sapi akan terus meningkat sementara persediaan tetap atau bahkan mengalami penurunan.

Persediaan daging sapi permintaan daging sapi yang meningkat, penawaran yang menurun, saluran pemasaran yang panjang atau kurang efisien akan menyebabkan harga yang tidak stabil. Pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga tersebut untuk mengurangi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga sekaligus mengurangi beban yang harus ditanggung oleh konsumen daging sapi.

Dalam upaya mengendalikan harga, menteri perdagangan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan nomor 47 tahun 2017, yang diharapkan mampu menekan harga daging sapi dan mencegah kecurangan dalam penentuan harga daging sapi.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan teori dan model implementasi kebijakan dari Repley dan Franklin. Teori ini menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berjalan sukses di lapangan. Dalam teori ini terdapat tiga cara dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka pemikiran kajian implementasi peraturan menteri perdagangan No. 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi daging sapi di Kota Bandar Lampung

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metodologi Dasar Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008)

Metode dasar penelitian ini adalah metode survei yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu, sehingga dapat disimpulkan metode survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi dari sejumlah besar responden (Surakhmad, 1994)

#### **3.2. Konsep Dasar dan Batasan Operasional**

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup semua pengertian yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Konsep dasar dan batasan operasional dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Konsep dasar dan batasan operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Daging Sapi	Daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Di setiap daerah, penggunaan daging ini berbeda-beda tergantung dari cara pengolahannya.
2	Harga daging sapi	Jumlah uang yang dikeluarkan responden untuk membeli daging sapi yang di ukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg)
3	Harga acuan	Harga yang ditetapkan yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan harga suatu barang (Rp)
4	Harga eceran	Harga transaksi antara penjual dengan pembeli untuk tiap jenis barang yang diecerkan menurut satuan tempat (Rp)
5	Peraturan	Tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur
6	Kebijakan	Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu
7	Implementasi	Kegiatan penerapan atau pelaksanaan suatu ketetapan atau peraturan yang ada
8	Pemasaran	Serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum
9	Saluran Pemasaran	Serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen
10	Rantai pasok	Suatu tempat untuk sistem organisasi menyalurkan hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa kepada para konsumennya
11	Peraturan Menteri Perdagangan No.47 2017	Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan tentang harga acuan untuk beberapa jenis komoditas disahkan pada bulan Juli 2017
12	Pedagang	Orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan
13	Pedagang Eceran	Menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan
14	Distributor	Seseorang atau perusahaan yang membeli produk dari produsen dan menjual kembali kepada toko atau <i>retail</i>
15	Rumah Potong Hewan	suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging bagi konsumsi masyarakat umum.
16	Tujuan Permendag No. 47 tahun 2017	Mencapai kestabilan harga daging sapi (menekan harga agar tidak terlalu tinggi), mengurangi inflasi daging sapi.
17	Sasaran Permendag No. 47 tahun 2017	Sasaran dari peraturan ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penetapan harga daging sapi di pasaran.

18	Pihak yang terlibat dalam Permendag No. 47 tahun 2017	Peternak, Rumah Potong Hewan, Pedagang, Konsumen, pemerintah khususnya menteri perdagangan, satuan tugas pangan, dan dinas perdagangan.
19	Efektif	Sebuah usaha untuk mendapatkan target ataupun tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang yang ditentukan.
20	Tidak efektif	Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ataupun tujuan namun lama tercapainya suatu tujuan tersebut.

### 3.3. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu pasar Tugu, pasar pasir Gintung, dan pasar Way Halim dengan pertimbangan bahwa ke tiga pasar tradisional tersebut merupakan pasar tradisional yang relatif besar diantara 31 pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Bandar Lampung.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang pedagang , 2 RPH, 2 peternak, 6 orang konsumen, dinas perdagangan, dan satgas pangan. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan April 2019. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi narasumber/partisipan/informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Moleong, 2005).

Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik *sampling* yang tidak memberikan kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel, sehingga penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2001) mengatakan *Snowball sampling* adalah



teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Responden pertama merupakan pedagang besar yang nantinya akan memberikan informasi mengenai sampel berikutnya.

### **3.4. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah:

#### **(1) Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara atau interview ke pedagang besar daging sapi, pedagang pengecer daging sapi, rumah potong hewan (RPH) dan peternak sapi sebagai responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang dibutuhkan adalah identitas, data mengenai harga daging sapi dan sapi, asal daging sapi dan sapi serta sarana produksi. Selain itu dilakukan observasi atau pengamatan langsung ke setiap pedagang daging sapi untuk mengamati penjualan daging sapi, serta melakukan pencatatan hasil wawancara atau hasil pengamatan yang telah dilakukan.

#### **(2) Data Sekunder**

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari internet yakni website Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, artikel dan jurnal penelitian terdahulu serta diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder lainnya juga berasal dari

peraturan menteri perdagangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan menteri perdagangan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 tentang harga acuan pembelian dipetani dan harga acuan penjualan dikonsumsi.

### **3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

1. Metode analisis data tujuan pertama yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2. Metode analisis tujuan kedua yaitu menggunakan teori Ripley dan Franklin. Teori ini menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berjalan sukses di lapangan. Dalam teori ini terdapat tiga cara dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Dalam analisis data juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2005).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini juga digunakan untuk memperkaya data, berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data karena triangulasi bersifat reflektif (Nasution, 2003).

Menurut Wiliam Wiersna dalam (Sugiyono, 2007), triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu pedagang, RPH, dan peternak.

b. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yaitu kegiatan pengamatan tidak hanya dilakukan pada waktu yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan pada pagi, siang dan sore hari.

c. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yaitu perbedaan penggunaan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara, kuesioner, dan observasi atau pengamatan.

## **IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

### **4.1. Letak Geografis, Administratif dan Penduduk Kota Bandar Lampung**

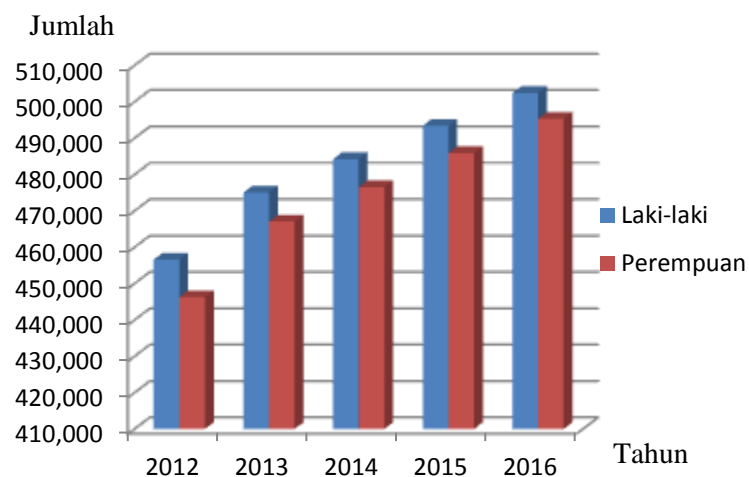
Kota Bandar Lampung adalah kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduknya. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Secara geografis, kota ini terletak pada  $5^{\circ}20'$  sampai  $5^{\circ}30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ}28'$  sampai dengan  $105^{\circ}37'$  bujur timur, letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang utama Pulau Sumatera, terletak di wilayah yang strategis. Letak geografis tersebut menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Kota Bandar Lampung juga memiliki peran sangat penting sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki 20 kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Bumi Waras. Panjang, Tanjung Karang Timur, Kedamaian, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Enggal, Tanjung Karang Barat, Kemiling, Langkapura, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi, dan Way Halim (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2018).

Jumlah penduduk Bandar Lampung pada tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Rincian jumlah penduduk pada tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 5 menunjukkan bahwa lima tahun terakhir jumlah penduduk mengalami peningkatan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan setiap tahunnya.

Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga akan berpengaruh pada permintaan pangan salah satunya adalah daging sapi. Badan Pusat Statistik tahun 2017 mengeluarkan data bahwa terdapat 31 pasar tradisional, 16 pasar modern dan 232 minimarket yang beroperasi saat ini di Bandar Lampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hanya beberapa pasar tradisional saja yang menjual daging sapi termasuk pasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian, terdapat juga 5 rumah potong hewan yang ada di Kota Bandar Lampung namun yang dijadikan sebagai tempat penelitian hanya dua rumah potong saja karena sebagian besar pedagang pengecer membeli daging sapi dari kedua RPH tersebut yaitu RPH Agus dan RPH Tampan. Pada penelitian ini juga diketahui sebaran pedagang pengecer daging sapi di Kota Bandar Lampung yaitu kurang lebih 30 pedagang, namun yang dijadikan sebagai responden yaitu 12 orang pedagang saja karena data yang diterima bersifat homogen. Penelitian ini juga melibatkan konsumen untuk menjadi salah satu responden yaitu masyarakat yang berdomisili di Kota bandar Lampung juga menjadikan beberapa dinas yang ada dan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan yang ada di Kota Bandar Lampung.

#### **4.2. Gambaran Umum Konsumsi dan Harga Daging Sapi di Bandar Lampung**

Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Selain itu, Bandar Lampung merupakan pusat perekonomian dimana banyak terjadi kegiatan perdagangan, hal

inilah yang mendorong masyarakat hidup dalam kategori modern. Mayoritas masyarakat modern mengkonsumsi sebagai makanan pokoknya, selain mengkonsumsi beras, sebagian besar masyarakat di kota ini juga mengkonsumsi daging untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuhnya. Salah satu daging yang dikonsumsi yaitu daging sapi. Menurut dinas ketahanan pangan konsumsi daging sapi di kota ini termasuk kategori yang cukup rendah yaitu sebesar 0,84 kg per kapita per tahun dan tingkat konsumsi nasional sebesar 1, 84 per kapita per tahun. Meskipun tidak semua masyarakat di kota ini mampu membeli daging sapi namun permintaan daging sapi dapat dikatakan cukup tinggi hal ini yang membuat banyak pedagang yang menjual daging sapi, namun daging sapi tersebut dijual hanya di beberapa pasar saja, dimana pasar tersebut termasuk kategori pasar terbesar di Kota Bandar Lampung.

Harga daging sapi relatif meningkat disebabkan beberapa faktor antara lain biaya produksinya mahal, rantai tataniaga yang cukup panjang, dan terdapat beberapa oknum yang dapat mempengaruhi naiknya harga daging sapi. Rincian harga daging sapi di tingkat RPH di Kota Bandar Lampung pada bulan Maret hingga Mei dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan bahwa harga jual daging sapi dari RPH ke pedagang pengecer yaitu sebesar Rp105.000,00/Kg untuk kualitas I namun untuk kualitas II yaitu sebesar Rp 100.000,00/ Kg. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan rata- rata harga jual daging sapi di beberapa RPH relatif sama.

Tabel 9. Harga daging sapi kualitas 1 dan kualitas 2 ditingkat RPH

No	Tanggal	Harga Daging Sapi Kualitas 1 di RPH (Rp/Kg)	Harga Daging Sapi Kualitas 2 di RPH (Rp/Kg)
1	27 Maret	105.000	100.000
2	28 Maret	105.000	100.000
3	29 Maret	105.000	100.000
4	30 Maret	105.000	100.000
5	31 Maret	105.000	100.000
6	26 April	105.000	100.000
7	27 April	105.000	100.000
8	28 April	105.000	100.000
9	29 April	105.000	100.000
10	30 April	105.000	100.000
11	03 Mei	105.000	100.000
12	06 Mei	105.000	100.000
13	10 Mei	105.000	100.000
14	11 Mei	105.000	100.000
15	12 Mei	105.000	100.000
Rata-rata		105.000	100.000

Sumber: Data diolah, 2019.

Tabel 9 menunjukkan harga daging sapi kualitas II ditingkat RPH dengan rata-rata harga sebesar Rp 100.000,00/Kg, biasanya jenis daging kualitas II ini disebut daging khas luar, biasanya jenis daging ini masih terdapat gajih disekitar daging khasnya berbeda dengan daging kualitas I dimana gajih sangat jarang ditemukan pada bagian dagingnya dan jenis daging sapi lainnya seperti tetelan, tulang iga, dan sanding lamur memiliki harga yang relatif sama antar RPH. Kualitas I dan II ditingkat pedagang disajikan pada Tabel 10.



Tabel 10. Harga daging sapi kualitas 1 dan kualitas 2 ditingkat pedagang di Kota Bandar Lampung.

No	Tanggal	Harga Daging Sapi Kualitas 1 di Pedagang (Rp/Kg)	Harga Daging Sapi Kualitas 2 di Pedagang (Rp/Kg)
1	27 Maret	120.000	110.000
2	28 Maret	120.000	110.000
3	29 Maret	120.000	110.000
4	30 Maret	120.000	110.000
5	31 Maret	120.000	110.000
6	26 April	120.000	110.000
7	27 April	120.000	110.000
8	28 April	120.000	110.000
9	29 April	120.000	110.000
10	30 April	120.000	110.000
11	03 Mei	120.000	110.000
12	06 Mei	120.000	110.000
13	10 Mei	120.000	110.000
14	11 Mei	120.000	110.000
15	12 Mei	120.000	110.000
Rata-rata		120.000	110.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan harga yang beredar dipasar tidak terlalu jauh berbeda dengan harga acuan yang telah dikeluarkan menteri perdagangan No.47 tahun 2017 dan konsumen tidak terlalu terbebani dengan harga daging sapi tersebut. Pedagang juga masih menjual daging sapi dengan kualitas II dan jenis daging lainnya seperti tetelan, sandung lamur, tulang sop, tulang iga, dan kikil hal ini akan memberikan peluang untuk konsumen mampu untuk membeli daging sapi.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 47 tahun 2017 di Bandar Lampung masih belum tercapai secara maksimal, hal ini dibuktikan dari masih banyaknya pedagang yang belum mengetahui adanya peraturan ini sehingga tidak menerapkan peraturan harga eceran tertinggi.
- (2) Faktor pendukung dari implementasi peraturan menteri perdagangan no 47 tahun 2017 di Kota Bandar Lampung yaitu adanya SOP dan Satgas Pangan namun belum berfungsi secara maksimal. Faktor penghambat dari implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 47 tahun 2017 di Bandar Lampung adalah tingkat kepatuhan yang berlaku rendah, kurangnya informasi HET yang diterima oleh pedagang, kurangnya keingintahuan pedagang, dan kurangnya sosialisasi dari pihak menteri perdagangan, serta isi peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

### **6.2. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagi pemerintah khususnya menteri perdagangan, ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan khususnya kebijakan pada komoditas daging sapi yang sangat

sulit dibeli oleh kalangan masyarakat karena daging sapi merupakan salah satu bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh manusia sebaiknya diperhitungkan segala situasi dan kondisi di lapangan seperti biaya produksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, jumlah permintaan dan penawaran serta resiko lainnya sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Setelah kebijakan ditetapkan sebaiknya dilakukan pengawasan secara rutin oleh pihak yang bersangkutan seperti dinas peternakan dan satgas pangan untuk turun langsung kelapangan untuk mengetahui diterapkan atau tidaknya peraturan tersebut.
- (3) Melakukan sosialisasi dan membuat poster tentang harga daging sapi terbaru dan memberikan sanksi kepada pihak yang tidak menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1) :1-4.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Konsumsi rata-rata perkapita seminggu bahan makanan penting di Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Bandar Lampung dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Bandar Lampung dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 2000. *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Jakarta.
- Djogo, T., Sunaryo, Suharjito D., dan Sirait M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF. Bogor.
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Durianto, Sugiarto, dan Sitingjak. 2004. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Erni Rohasti. 2017. Penggunaan Daging Sapi Pada Rumah Makan Padang Di Kota Bandar Lampung. Vol. 5 (3). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Fatih, A. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press. Bandung.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2018. *Prospek dan arah pengembangan agribisnis: sapi*. 2018. <http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/files/00-sapi.pdf>.

- Kotler, Amstrong. 1999. *Teori Ekonomi Makro Intermediate*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kotler, P. 2002. *Dasar-dasar Pemasaran*. Erlangga. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. IKAPI. Bandung
- Panuhun. 2012. *Daging Sebagai Protein Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal*. <http://dagingsapi/protein/panuhun.htm>. [12oktober 2015].
- Pratama, Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi (edisi ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. 2008
- Rahardja, Prathama., dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Safawi, I., Sujianto dan Rusly, Z. 2010. *Jurnal Kebijakan Publik. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan*. Universitas Riau. Riau.
- Saragih, F.V. 2018. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2017 Pada Pedagang Beras di Bandar Lampung. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Metode Teknik*. Tarsito. Bandung.
- Sutopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Perss. Surakarta
- Swastha. 2010. *Manajemen Penjualan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wicaksono, Arditya. 2012. Optimalisasi Kepemimpinan Nasional dalam Melaksanakan Kebijakan Distribusi Pangan Dapat Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Agriekonomika*, 1(1), 36-46